

Peran Strategis Pemerintah dalam Pemberdayaan Lansia di Kota Yogyakarta

Dhinta Ekka Wardhani¹, Agus Salim², Rachmanto³

^{1,2}Departemen Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Indonesia

^{2,3}Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta

*E-mail: dhinta.ekka3002@mail.ugm.ac.id¹, agussalimse@ugm.ac.id²,
rachmantonew@gmail.com³

Abstrak

Lansia merupakan individu yang telah mencapai usia 60 tahun atau lebih. Jumlah penduduk lansia diproyeksikan akan meningkat dari tahun ke tahun dan secara signifikan meningkat dalam beberapa dekade mendatang. Peningkatan jumlah penduduk lansia harus diiringi dengan pemberdayaan lansia. Penelitian ini membahas peran pemerintah dalam pemberdayaan lansia di Kota Yogyakarta melalui analisis ketercapaian 5 dari 17 dimensi pelayanan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif yaitu dengan melakukan wawancara terhadap lansia, pra lansia yang merawat lansia, tenaga ahli yang berfokus pada lansia serta studi literatur pada dokumen hasil penilaian indeks kota ramah lansia tahun 2024. Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa 5 dimensi pemberdayaan tersebut telah terlaksana dengan cukup baik. Pemerintah dan seluruh *stakeholder* berkolaborasi untuk mencapai tujuan pemberdayaan di setiap dimensinya. Namun, terdapat faktor penghambat pelaksanaan pemberdayaan lansia yang menjadi tantangan yang harus diatasi dan sebagai evaluasi untuk pemerintah dalam melaksanakan pemberdayaan periode berikutnya.

Kata kunci: *Lansia, Pra Lansia, Pemberdayaan, dan Ramah Lansia*

1. PENDAHULUAN

Saat ini, Indonesia berada dalam fase *ageing population*, yaitu proporsi penduduk kelompok lanjut usia (lansia) mengalami peningkatan dan lebih besar secara signifikan dibandingkan penduduk kelompok usia muda. Indonesia telah memasuki fase *ageing population* sejak tahun 2021, ditandai dengan persentase lansia yang selalu mengalami peningkatan dari tahun 2010 hingga 2022 dan pada tahun 2023 telah mencapai 12% atau setara dengan 29 juta penduduk Indonesia termasuk penduduk lansia (BPS, Statistik Penduduk Lanjut Usia 2023). Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan lansia sebagai seseorang yang berusia 55 tahun atau lebih. Selain itu, UU No. 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia juga menyebutkan pada pasal 1 ayat 2 bahwa usia lanjut dimulai pada usia 60 tahun. Secara garis besar, lansia merupakan individu yang telah mencapai usia 60 tahun atau lebih. Lansia dikategorikan ke dalam tiga kelompok oleh Kementerian Sosial Indonesia berdasarkan kondisi fisik, mental, dan sosial, serta seberapa mandiri atau tergantungnya lansia pada lingkungannya. Kategori tersebut antara lain: (1) Pra-Lanjut Usia (Pra-LU) yaitu populasi lansia yang didefinisikan sebagai usia 60-69 tahun, (2) Lanjut Usia (LU), kelompok yang mencakup warga lanjut usia yang berusia 70 hingga 79 tahun, dan (3) Lanjut Usia Akhir (LUA), didefinisikan sebagai lansia yang berusia 80 tahun atau lebih.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Yogyakarta, jumlah penduduk lansia (60 tahun ke atas) Kota Yogyakarta tahun 2023 sebesar kurang lebih 60 ribu penduduk atau setara dengan 16% dari total jumlah penduduk di Kota Yogyakarta. Jumlah penduduk lansia diproyeksikan akan meningkat dari tahun ke tahun dan secara signifikan akan meningkat dalam beberapa dekade mendatang. Berdasarkan hasil perhitungan dari hasil Sensus Penduduk 2020 (SP2020), Pada tahun 2035 diproyeksikan bahwa jumlah penduduk lansia mengalami peningkatan menjadi 82 ribu penduduk lansia atau meningkat sebesar 36% dari tahun 2023.

Peningkatan jumlah penduduk lansia ini harus diiringi dengan pemberdayaan lansia. Pemberdayaan merupakan upaya untuk memberikan daya dan memampukan masyarakat dengan mempromosikan, menginspirasi, dan meningkatkan kesadaran akan potensi mereka agar lebih efektif. Menurut Mardikanto dkk (dalam Sulasmi, 2021:4), pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memberikan kekuatan atau daya kepada masyarakat. Kemampuan yang terintegrasi ke dalam masyarakat untuk memperkuat keberdayaan masyarakat tersebut dalam rangka menemukan pilihan-pilihan baru untuk pengembangan

masyarakat adalah definisi lain dari pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks ini, pemberdayaan lansia merupakan upaya untuk meningkatkan potensi atau kemampuan lansia dalam mewujudkan kesejahteraan bagi lansia melalui berbagai program dan kegiatan sehingga lansia dapat berperan aktif didalamnya. Tujuan dari pemberdayaan lansia adalah untuk memastikan bahwa lansia dapat terus memberikan kontribusi sosial dan ekonomi serta mempertahankan standar hidup yang tinggi. Selain membutuhkan perlindungan, para lansia juga perlu diberikan dorongan yang mereka butuhkan untuk terus berkontribusi kepada masyarakat dan menjadi anggota masyarakat yang produktif.

Berdasarkan prosesnya, ruang lingkup pemberdayaan masyarakat dapat dibagi menjadi tiga bagian: (1) pra-pemberdayaan, yaitu membangun ruang interaksi yang positif agar masyarakat merasa mampu dan percaya diri untuk menjadi pelaku pembangunan; (2) pelaksanaan pemberdayaan, yaitu memosisikan masyarakat sebagai subjek pembangunan yang sejajar dengan pemangku kepentingan lainnya; dan (3) pasca pemberdayaan, yaitu ruang lingkup yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk meneruskan proses pemberdayaan meskipun keterlibatan pemangku kepentingan lainnya telah selesai karena keterbatasan waktu, anggaran, dan kegiatan (Agussani, 2021).

Pada dasarnya, pemberdayaan memiliki empat prinsip yang harus dipenuhi, yaitu kesetaraan, kemandirian, partisipasi, dan keberlanjutan (Najiati, Asmana, dan Suryadiputra, 2005). Pertama, prinsip kesetaraan mencakup bagaimana masyarakat diperlakukan secara setara tanpa membedakan identitas individu, dimana masyarakat memiliki hak, tugas, dan tanggung jawab yang sama. Kedua, prinsip kemandirian, dalam lingkup pemberdayaan, kemandirian mengacu pada orientasi jangka pendek dan panjang dari suatu pemberdayaan. Proses pemberdayaan dapat meningkatkan kemampuan dan kapasitas dari masyarakat itu sendiri, baik berupa keterampilan maupun pengetahuan. Ketiga, prinsip partisipasi meliputi peran masyarakat menjadi objek dan subjek pemberdayaan sehingga masyarakat memiliki kesempatan untuk mengambil keputusan dengan mempertimbangkan hal-hal yang dibutuhkan. Dengan partisipasi ini, dapat meningkatkan efektivitas dari pemberdayaan yang tentunya melibatkan komunikasi dua arah. Keempat, prinsip keberlanjutan, yaitu pemberdayaan harus dilaksanakan secara berkala dan terus menerus, tidak hanya program telah selesai dilaksanakan tanpa adanya kelanjutannya. Pemantauan dan evaluasi harus dilakukan, serta koordinasi dan komunikasi harus ditingkatkan, untuk mendapatkan hasil maksimal dari inisiatif pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.

Merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari dan Arsiyah (2015) yang berfokus pada peran pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan pemberdayaan lansia, dimana penelitian ini berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Hasil dari penelitian tersebut yaitu pemberdayaan didukung oleh berbagai kegiatan produktif di Kabupaten Sidoarjo sudah cukup bagus, tetapi terdapat hambatan - hambatan yang perlu diatasi. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Indrayogi, Priyono, dan Asyisyah (2022) berfokus pada peningkatan kualitas hidup lansia melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Banjaransari, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka. Hasil dari penelitian ini adalah seluruh lansia berpartisipasi aktif dalam kegiatan - kegiatan yang dilakukan. Kedua penelitian tersebut telah mengungkapkan pemberdayaan lansia dengan sudut pandang yang berbeda, yaitu dari sisi pemerintah dan sisi lansia. Selain itu, terdapat penelitian dari Pratono & Maharani (2018) menyatakan kepemimpinan komunitas memegang peranan penting dalam perawatan jangka panjang. Penelitian mereka menunjukkan perawatan jangka panjang dan standar kualitas sulit untuk ditingkatkan karena sedikitnya anggota masyarakat yang menjadi sukarelawan, kurangnya dukungan dari para pemimpin agama, sumber daya yang terbatas, dan pelatihan sukarelawan yang tidak memadai. Perlu dilakukan peningkatan layanan dengan kegiatan yang kreatif dan sesuai dengan budaya masyarakat. Yeung & Thang (2018) menjelaskan permintaan perawatan jangka panjang bagi lansia akan mengalami peningkatan pada beberapa dekade mendatang. Hal ini disebabkan menurunnya angka kelahiran, bertambahnya usia harapan hidup, dan meningkatnya migrasi. Wanita lanjut usia di rumah tangga berpenghasilan rendah memiliki kebutuhan yang paling tidak terpenuhi. Layanan berbasis rumah dan berbasis komunitas akan menjadi bagian integral dari sistem perawatan jangka panjang. Dalam melakukan perawatan, perlu memperhatikan norma dan budaya sekaligus mempertimbangkan keinginan lansia dalam perawatan yang akan dilakukan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah dalam pemberdayaan lansia di Kota Yogyakarta melalui analisis ketercapaian 5 dari 17 dimensi pelayanan. Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang menyeluruh mengenai seberapa peran pemerintah dalam pemberdayaan lansia di Kota Yogyakarta pada tahun 2024.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif, yaitu dengan menganalisis peran pemerintah dalam melaksanakan pemberdayaan dan pelayanan lansia di Kota Yogyakarta melalui 5 dimensi dari 17 dimensi sebagai tolok ukur pemberdayaan dan pelayanan masyarakat dengan sasaran lansia. Menurut Miles dan Huberman (1984), dalam Sugiyono (2020:133), terdapat empat tahapan dalam analisis data kualitatif yang dilakukan secara interaktif dan runtut yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Pengumpulan data adalah langkah awal. Observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, atau gabungan ketiganya (triangulasi) dapat digunakan untuk mengumpulkan data. Karena pengumpulan data berlangsung selama beberapa hari atau mungkin berbulan-bulan, maka akan ada banyak dan beragam data yang terkumpul. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari wawancara lansia, pra lansia yang merawat lansia, dan tenaga ahli yang berfokus pada lansia. Sedangkan data sekunder berasal dari dokumen hasil penilaian indeks kota ramah lansia tahun 2024. Reduksi data akan digunakan untuk menganalisis data yang terkumpul dengan cara merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk mencarinya bila diperlukan. Berikutnya adalah penyajian data, juga dikenal sebagai display data, ketika data ditampilkan dalam bentuk prosa naratif. Terakhir, membuat kesimpulan dan memverifikasinya. Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau penjelasan suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peran Pemerintah dan *Stakeholder* dalam Program Pemberdayaan Lansia

Dengan sejumlah proyek dan program yang ditargetkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan standar hidup penduduk lansia, Yogyakarta berdedikasi untuk menjadi kota yang ramah lansia. Dengan mengikutsertakan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam upaya ini, pemerintah daerah juga berdedikasi untuk memajukan layanan bagi para lansia. Dalam lima tahun ke depan, Yogyakarta diharapkan dapat menjadi yang terdepan dalam mengembangkan kota yang ramah lansia. Dengan penekanan pada penciptaan layanan yang

terintegrasi dan mendorong keterlibatan masyarakat, Keputusan Walikota Yogyakarta No. 450 Tahun 2019 tentang Roadmap Kota Yogyakarta Menuju Kota Ramah Lanjut Usia merupakan pedoman untuk menjadikan Yogyakarta sebagai kota yang ramah lansia.

Untuk tujuan strategis daerah Kota Yogyakarta dalam meningkatkan pemberdayaan dan pelayanan masyarakat yang ditujukan untuk lansia, terdapat 17 dimensi pelayanan lansia berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta No. 450 Tahun 2019 yang digunakan sebagai tolak ukur sejauh mana Kota Yogyakarta mewujudkan kota ramah lansia. 17 dimensi tersebut merupakan gabungan dari dimensi kota ramah lansia dari WHO dan Peraturan Walikota Yogyakarta No. 38 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia. 17 dimensi tersebut antara lain: (1) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual; (2) Pelayanan kesehatan; (3) Pekerjaan ramah lanjut usia; (4) Layanan pendidikan dan pelatihan; (5) Kemudahan mengakses fasilitas, sarana, dan prasarana umum; (6) Ruang terbuka dan bangunan; (7) Transportasi; (8) Perumahan dan permukiman; (9) Penghormatan dan inklusi sosial; (10) Partisipasi sosial; (11) Partisipasi sipil; (12) Komunikasi dan informasi; (13) Dukungan komunitas dan pelayanan sosial; (14) Kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum; (15) Perlindungan sosial; (16) Perlindungan dari ancaman dan tindak kekerasan; (17) Bantuan sosial. Dari 17 dimensi tersebut, penelitian ini berfokus pada 5 dimensi kota ramah lansia sebagai tolok ukur. Berikut merupakan 5 dimensi dan penjabaran evaluasi pencapaian yang berpedoman pada hasil penilaian kota ramah lansia di Kota Yogyakarta tahun 2024.

1. Pelayanan Keagamaan dan Mental Spiritual

Pelayanan keagamaan dan mental spiritual mengacu pada berbagai program bantuan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan spiritual dan psikologis masyarakat, terutama lansia. Dengan adanya pelayanan ini, diharapkan lansia dapat meningkatkan kesejahteraan mental dan spiritual di usia senja. Pelayanan ini dapat berupa bimbingan keagamaan, ceramah, dan ibadah bersama.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap beberapa lansia di Kota Yogyakarta, sebagian lansia menyatakan bahwa untuk tempat peribadatan sudah terjangkau dan banyak kegiatan-kegiatan keagamaan pada umumnya. Namun, untuk layanan psikolog masih belum terfasilitasi dengan baik karena lansia harus ke puskesmas yang jaraknya cukup jauh untuk mendapatkan pelayanan tersebut.

Salah satu implementasi kegiatan pemberdayaan melalui pelayanan keagamaan dan spiritual telah dilakukan di Kelurahan Kricak, yaitu tadarus Al-Quran. Kegiatan

tadarus ini dilaksanakan di Masjid Baiturrahman, Kricak, Tegalrejo, pada hari senin dan rabu. Sekitar lima belas lansia berpartisipasi dalam kegiatan ini. Kegiatan ini meliputi kegiatan membaca Al-Quran dan ceramah singkat dengan topik yang berbeda - beda. Tujuan kegiatan ini yaitu untuk mengembangkan pemahaman agama dan mempererat silaturahmi di antara para jamaah.

2. Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan untuk lansia mengacu pada berbagai proyek dan kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dan kesejahteraan lansia melalui pengelolaan dan pemberian perawatan medis yang efisien. Pelayanan ini meliputi program promosi kesehatan yang berkaitan dengan praktik hidup sehat untuk lansia dan fasilitas perawatan kesehatan yang ramah lansia, mudah diakses, dan dapat dijangkau kapan saja melalui berbagai moda transportasi.

Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta memiliki peran yang cukup besar untuk memenuhi pelayanan kesehatan di Kota Yogyakarta. Dari hasil wawancara, Dinas Kesehatan berupaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan baik dari kapasitas tenaga kesehatan maupun penyediaan layanan kesehatan untuk masyarakat. Pada segi peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, Dinas Kesehatan menyelenggarakan kegiatan *update knowledge* pengelola program lansia yang diselenggarakan 2 kali dalam 1 tahun dan kegiatan webinar - webinar lainnya. Sedangkan di segi pelayanan kepada lansia, Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta menekankan upaya promotif dan preventif kepada pra lansia dan lansia melalui program pemberian edukasi kesehatan yang bekerja sama dengan Perhimpunan Gerontologi Medik Indonesia (PERGEMI) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Program tersebut dilaksanakan setiap seminggu sekali dengan mengundang 30 lansia dari 45 kelurahan secara bergilir. Selain Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, terdapat kolaborasi antar OPD, salah satunya adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta yang juga berperan dalam bidang kesehatan yaitu melalui program posyandu lansia.

3. Pelayanan Kesempatan Kerja

Pelayanan kesempatan kerja mengacu pada berbagai kegiatan yang bertujuan untuk memberikan peluang kepada lansia untuk bekerja sesuai dengan kondisi dan kemampuan lansia tersebut. Pemerintah kota melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kota Yogyakarta memiliki program pemberdayaan lansia yang produktif melalui komisi lansia yang berupa pelatihan dan keterlibatan dalam berbagai program pemberdayaan. Salah satu program pemberdayaan yang diselenggarakan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta adalah program Kelompok Usaha Bersama (KUBE), dimana KUBE ini bukan program khusus untuk lansia tetapi banyak anggota yang lansia sehingga melalui KUBE ini dapat meningkatkan partisipasi kerja untuk lansia secara implisit.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, sebagian besar lansia di Kota Yogyakarta telah mendapatkan pelatihan dan pemberdayaan melalui kegiatan pembuatan barang handmade dan memasak. Terdapat fasilitas usaha mandiri dari LAZISMU untuk seluruh kalangan, sehingga beberapa lansia dan pra lansia memanfaatkan hal tersebut. Namun, terdapat lansia yang berpendapat bahwa kurangnya lapangan pekerjaan di wilayah mereka sehingga kesulitan untuk mendapatkan kesempatan kerja. Selain itu, lansia takut jika terdapat diskriminasi pekerjaan karena keterbatasan fisik dan tenaga saat bekerja.

Implementasi kegiatan pemberdayaan mengenai pelayanan kesempatan kerja terdapat di Kelurahan Purbayan, yaitu adanya kerajinan perak yang mana kebanyakan pengrajin perak adalah para lansia. Melalui sentra kerajinan perak ini, para lansia menjaga warisan turun menurun dan menginspirasi generasi muda untuk melanjutkan warisan tersebut. Sentra kerajinan perak ini telah populer di kalangan wisatawan dan sudah menerima pesanan dari luar kota. Selain di Kelurahan Purbayan, salah satu responden lansia yang berusia sekitar 70 tahun di Kelurahan Demangan menyampaikan bahwa dia mendapatkan pekerjaan menjadi marbot masjid. Pihak masjid memberikan kepercayaan kepadanya untuk mengurus masjid walaupun lansia tersebut memiliki keterbatasan fisik.

4. Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan

Pelayanan pendidikan dan pelatihan mengacu pada berbagai kegiatan yang berfokus untuk memberdayakan dan meningkatkan kemampuan lansia agar dapat terus mandiri dan produktif. Pelayanan ini mencakup kegiatan pelatihan, konsultasi, dan pendampingan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dengan memberikan kompensasi biaya secara adil dan sesuai. Selain itu, pelayanan ini juga berkaitan dengan keikutsertaan lansia dalam menempuh pendidikan informal.

Dalam pelayanan pendidikan dan pelatihan, DP3AP2KB Kota Yogyakarta memiliki peran untuk melakukan program pemberdayaan Bina Keluarga Lansia (BKL). Kegiatan BKL mencakup penyuluhan materi pembangunan lansia tanggung dan kelanjutusiaan, kunjungan rumah, pendampingan, rujukan, kegiatan keagamaan, kegiatan sosial, dan kegiatan produktif lainnya. Tujuan dari BKL adalah membentuk lansia-lansia yang tangguh dan produktif sebagai peningkatan kualitas hidup lansia. DP3AP2KB Kota Yogyakarta juga berkolaborasi dengan para stakeholder dalam pelaksanaan programnya, salah satunya dengan pengelola pendidikan informal dan institusi pendidikan formal yang membantu memfasilitasi lansia untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pendidikan informal seperti Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) yang sesuai dengan potensi lansia dan program penyuluhan oleh institusi formal melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) dari perguruan tinggi UII dan lain sebagainya.

Salah satu implementasi kegiatan pemberdayaan mengenai pelayanan pendidikan dan pelatihan telah dilakukan di Kelurahan Gedongkiwo, yaitu Sekolah Lansia "Gemati". Sekolah Lansia "Gemati" adalah sekolah lansia yang terjalin atas dasar kerja sama antara pihak Kelurahan Gedongkiwo dengan pengurus lansia. Sekolah lansia ini memiliki 37 siswa dan masih berjalan optimal hingga saat ini. Pada Sekolah lansia ini terdapat pemaparan materi - materi mengenai kesehatan, nilai - nilai agama, dasar - dasar nilai kehidupan, pengembangan diri melalui minat kegiatan, dan lain sebagainya.

5. Kemudahan dalam Aksesibilitas

Kemudahan dalam aksesibilitas mengacu pada penggunaan fasilitas serta layanan yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan sehari-hari. Kemudahan aksesibilitas ini mendukung lansia untuk dapat melakukan aktivitas sehari-hari tanpa tergantung orang lain yang tentunya akan mendorong partisipasi lansia dalam kegiatan bersosial. Aksesibilitas ini mencakup beberapa aspek, seperti transportasi, infrastruktur fisik, dan layanan publik.

Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta berperan penting untuk mewujudkan fasilitas prioritas untuk lansia, seperti prioritas pembelian tiket dalam pemilihan kursi khusus pengguna kursi prioritas. Menurut hasil wawancara yang telah dilakukan, sebagian besar lansia berpendapat bahwa fasilitas dan aksesibilitas untuk lansia sudah

cukup baik.. Selain itu, terdapat responden yang berharap agar pelayanan prioritas untuk lansia sehingga lansia dapat dipermudah dan didahulukan.

3.2 Faktor Pendukung

Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki komitmen penuh untuk meningkatkan pemberdayaan dan pelayanan lansia melalui berbagai kebijakan, kegiatan, dan program. Seluruh OPD tentunya memiliki peran masing-masing sesuai dengan kapasitasnya baik di depan layar maupun di belakang layar. Selain dari pemerintah terkait, terdapat mitra-mitra non pemerintahan yang turut berpartisipasi aktif mendukung pemberdayaan tersebut, seperti BAZNAS, BPD, perusahaan, bank, dan hotel yang berada di Kota Yogyakarta. Para lansia dan pra lansia merasa terfasilitasi dengan baik untuk mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan. Pada tahun 2024 sudah terdapat Layanan Lansia Terintegrasi (LLT) di 6 wilayah kelurahan yaitu Kelurahan Wirogunan, Purbayan, Gedongkiwo, Baciro, dan Semaki. LLT berfungsi sebagai penghubung bagi kebutuhan lansia dan penyedia layanan. LLT diharapkan dapat menjadi perantara bagi layanan terpadu yang meliputi layanan kesehatan, sosial, dan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan lansia. Dengan adanya dukungan dari berbagai *stakeholder*, pemberdayaan lansia dapat semakin baik dan berlanjut tiap tahunnya.

3.3 Faktor Penghambat

Faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan dan pelayanan lansia antara lain: (1) Isu peningkatan jumlah lansia belum menjadi wacana utama sehingga semua pihak belum terlibat aktif di dalamnya. Perlu upaya strategis untuk menjadikan isu lansia sebagai prioritas sehingga bisa menjadi perhatian utama; (2) Keterlibatan masyarakat serta komunitas dalam pemberdayaan lansia perlu untuk makin ditingkatkan. Mereka lebih dekat dan mengetahui kebutuhan lansia yang berada di lingkungannya. Apabila partisipasi mereka dapat terus ditingkatkan maka satu per satu isu lansia dapat ditangani dengan baik; (3) Keterbatasan fisik lansia dibandingkan dengan kelompok usia lainnya sehingga perlu penyesuaian dan perhatian yang berbeda; dan (4) Kapasitas SDM yang memahami tentang karakteristik lansia perlu untuk terus ditingkatkan. Mereka perlu mendapatkan edukasi secara berkesinambungan serta peningkatan kemampuan agar dapat terlibat dalam upaya pemberdayaan lansia secara optimal.

4. KESIMPULAN

Peran pemerintah dalam pemberdayaan lansia di Kota Yogyakarta meliputi: (1) pelayanan keagamaan dan mental spiritual; (2) pelayanan kesehatan; (3) pelayanan kesempatan kerja; (4) pelayanan pendidikan dan pelatihan; dan (5) kemudahan dalam aksesibilitas. Secara keseluruhan, dimensi pemberdayaan tersebut telah terlaksana dengan cukup baik, pemerintah dan seluruh *stakeholder* berkolaborasi untuk mencapai tujuan pemberdayaan di setiap dimensinya. Dengan adanya dukungan dari para *stakeholder*, pelaksanaan pemberdayaan lansia dapat semakin baik dan berkelanjutan. Kemudian, untuk faktor penghambat pemberdayaan lansia dapat menjadi tantangan yang harus diatasi dan sebagai evaluasi untuk pemerintah dalam melaksanakan pemberdayaan kedepannya.

Dari pemenuhan dimensi pemberdayaan lansia yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta, terdapat beberapa saran untuk pelaksanaan pemberdayaan lansia di periode berikutnya.

1. Setiap OPD terkait dapat melaksanakan pemberdayaan lansia secara berkelanjutan dan konsisten sesuai dengan tupoksinya masing - masing sehingga program - program yang telah dirancang dapat terlaksana dengan baik.
2. Memberikan edukasi berupa pemahaman yang jelas dan komprehensif mengenai bagaimana menghadapi lansia bagi masyarakat. Dengan adanya pemahaman tersebut, lansia dapat diberlakukan sesuai dengan hak - hak yang seharusnya mereka dapatkan.
3. Menyebarluaskan isu lansia melalui media sosial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, yang meliputi kegiatan lansia, hak - hak lansia, program pemerintah, dan informasi - informasi pendukung lainnya.

Melalui saran-saran tersebut, diharapkan dapat menjadi pertimbangan untuk meningkatkan pemberdayaan lansia di periode berikutnya sehingga program-program pemberdayaan lansia dapat menjadi lebih baik.

REFERENSI

- Agussani. (2021). *Desain Pemberdayaan Masyarakat Modern*. In PT RajaGrafindo Persada. Depok: Rajawali Pers.
- Bensliman, R., Callorda Fossati, E., Casini, A., Degavre, F., & Mahieu, C. (2022). How local stakeholders' social representations shape the future of ageing in place: Insights from 'health and care social innovations' in Wallonia (Belgium). *Health & social care in the community*, 30(6), e4211-e4222. <https://doi.org/10.1111/hsc.13815>
-

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta. (2024). Hasil Penilaian Indeks Ramah Lansia Kota Yogyakarta Tahun 2024.

Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia. (2023). Statistik Penduduk Lanjut Usia 2023.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Yogyakarta. (2023).

Fulmer, T., Reuben, D. B., Auerbach, J., Fick, D. M., Galambos, C., & Johnson, K. S. (2021). Actualizing Better Health And Health Care For Older Adults: Commentary describes six vital directions to improve the care and quality of life for all older Americans. *Health Affairs*, *40*(2), 219-225. <https://doi.org/10.1016/j.maturitas.2020.05.018>.

Indrayogi, I., Priyono, A., & Asyisya, P. (2022). Peningkatan Kualitas Hidup Lansia Melalui Pemberdayaan Lansia Produktif, Gaya Hidup Sehat Dan Aktif. *Indonesian Community Service and Empowerment Journal (IComSE)*, *3*(1), 185-191. <https://doi.org/10.34010/icomse.v3i1.5330>.

Keputusan Walikota Yogyakarta No. 450 Tahun 2019 tentang Roadmap Kota Yogyakarta Menuju Kota Ramah Lanjut Usia.

Najati, S., Asmana, A., & Suryadiputra, I. N. N. (2005). *Pemberdayaan masyarakat di lahan gambut*. Wetlands International Indonesia Programme.

Peraturan Walikota Yogyakarta No. 38 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia.

Pratono, A. H., & Maharani, A. (2018). Long-Term Care in Indonesia: The Role of Integrated Service Post for Elderly. *Journal of Aging and Health*, *30*(10), 1556-1573. <https://doi.org/10.1177/0898264318794732>.

Puspitasari, R. B., & Arsiyah, A. (2015). Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Lanjut Usia di Kabupaten Sidoarjo. *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)*, *3*(2), 199-212. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v3i2.192>.

Siette, J., Berry, H., Jorgensen, M., Brett, L., Georgiou, A., McClean, T., & Westbrook, J. (2021). Social participation among older adults receiving community care services. *Journal of Applied Gerontology*, *40*(9), 997-1007. <https://doi.org/10.1177/0733464820938973>.

Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Sulasmi, E. (2021). Desain Pemberdayaan Masyarakat Modern. *Aksaqila Jabfung*.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

Yeung, W.-J. J., & Thang, L. L. (2018). Long-Term Care for Older Adults in ASEAN Plus Three: The Roles of Family, Community, and the State in Addressing Unmet Eldercare Needs. *Journal of Aging and Health*, *30*(10), 1499-1515. <https://doi.org/10.1177/0898264318796345>.
